

ABSTRAK

Minuman beralkohol, atau minuman keras adalah minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan, atau fermentasi tanpa penyulingan, dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat tinggi serta mengandung senyawa etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH). Di Kabupaten Jombang, penjualan minuman beralkohol di warung-warung angkringan telah menjadi permasalahan klasik yang berpotensi memicu tindakan kejahatan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diberlakukan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas terkait minuman beralkohol, dengan tujuan meminimalkan dampak negatifnya di masyarakat Kabupaten Jombang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Oleh karena itu fokus penelitian ini berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang bersifat analisis deskriptif melalui wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum efektif dilakukan di warung-warung angkringan Jombang, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat, serta adanya dukungan tidak resmi dari oknum Kepolisian dan TNI terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi menghambat optimalisasi penegakan hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009, Implementasi

ABSTRACT

Alcoholic beverages, or liquor, are beverages produced through a process of fermentation and distillation, or fermentation without distillation, from agricultural materials that contain high carbohydrates and contain ethanol or ethyl alcohol compounds (C₂H₅OH). In Jombang district, the sale of alcoholic beverages in angkringan stalls has become a classic problem that has the potential to trigger crime. Jombang District Regulation No. 16/2009 on the Supervision and Control of Alcoholic Beverages was enacted to regulate and supervise activities related to alcoholic beverages, with the aim of minimizing their negative impact on the people of Jombang District.

This research aims to identify the implementation of Jombang District Regulation No. 16/2009 on the Supervision and Control of Alcoholic Beverages. Therefore, the focus of this research is related to the effectiveness of Jombang District Regulation No. 16/2009 on the Supervision and Control of Alcoholic Beverages. The method used in the research is a type of empirical legal research using a legal sociology approach that is descriptive analysis through interviews, and observation.

The results of this study indicate that the implementation of Jombang Regency Regional Regulation Number 16 of 2009 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages has not been effective, this is due to economic factors that influence people's behavior, as well as unofficial support from unscrupulous police and military personnel for the sale of alcoholic beverages without a permit. In addition, the low awareness and understanding of regulations hinder the optimization of law enforcement and socialization carried out by law enforcement officials.

Keywords: *Alcoholic Beverages, Jombang District Regulation No. 16/2009, Implementation*